

**ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
ANTARKECAMATAN BERDASARKAN TIPOLOGI KLASSEN DI KABUPATEN
BOGOR**

**ANALYSIS OF EDUCATIONAL DEVELOPMENT INEQUALITY ACROSS
SUBDISTRICTS BASED ON THE KLASSEN TYPOLOGY IN BOGOR REGENCY**

Farah Nur Amalia

Universitas Indonesia

farah.nur31@ui.ac.id

ABSTRACT

Educational development inequality remains a serious problem in Bogor Regency, which has 40 subdistricts with highly diverse geographical characteristics. This study aims to analyze patterns of educational development inequality across subdistricts using the Klassen Typology approach based on Human Development Index (HDI) and Education Index data for the 2020-2023 period. The research method employs a descriptive quantitative approach with spatial analysis, processing secondary data from BPS Bogor Regency covering Expected Years of Schooling (EYS), Mean Years of Schooling (MYS), and HDI. Results show uneven distribution of subdistricts with clear polarization between advanced and underdeveloped areas. Nine subdistricts are in Quadrant I (advanced and fast-growing), concentrated in northern and eastern areas near economic growth centers, while subdistricts in Quadrant IV (underdeveloped) are scattered in southern and western areas with difficult topography and limited infrastructure. This inequality is influenced by regional economic conditions (GRDP), road infrastructure quality which drastically decreased by more than 75% during 2018-2022, geographical accessibility, and disparities in educational facilities and teaching staff. This study recommends region-based educational development policies, including infrastructure improvement, proportional budget allocation, and implementation of affirmative policies for underdeveloped subdistricts to achieve sustainable educational quality equity.

Keywords: *Educational Inequality, Klassen Typology, Regional Development, Bogor Regency, Education Index.*

ABSTRAK

Ketimpangan pembangunan pendidikan masih menjadi permasalahan serius di Kabupaten Bogor yang memiliki 40 kecamatan dengan karakteristik geografis sangat beragam. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola ketimpangan pembangunan pendidikan antarkecamatan menggunakan pendekatan Tipologi Klassen berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pendidikan periode 2020-2023. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan analisis spasial, mengolah data sekunder dari BPS Kabupaten Bogor yang mencakup Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan IPM. Hasil penelitian menunjukkan distribusi kecamatan yang tidak merata dengan polarisasi jelas antara kecamatan maju dan tertinggal. Sembilan kecamatan berada di Kuadran I (maju dan tumbuh cepat) yang terkonsentrasi di wilayah utara dan timur dekat pusat pertumbuhan ekonomi, sementara kecamatan di Kuadran IV (tertinggal) tersebar di wilayah selatan dan barat dengan topografi sulit dan infrastruktur terbatas. Ketimpangan ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi wilayah (PDRB), kualitas infrastruktur jalan yang menurun drastis lebih dari 75% selama 2018-2022, aksesibilitas geografis, serta disparitas fasilitas pendidikan dan tenaga pendidik. Penelitian

ini merekomendasikan kebijakan pembangunan pendidikan berbasis karakteristik wilayah, termasuk perbaikan infrastruktur, alokasi anggaran proporsional, dan penerapan kebijakan afirmatif untuk kecamatan tertinggal guna mencapai pemerataan kualitas pendidikan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Ketimpangan Pendidikan, Tipologi Klassen, Pembangunan Wilayah, Kabupaten Bogor, Indeks Pendidikan.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu indikator fundamental dalam mengukur kualitas pembangunan manusia dan menjadi instrumen penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya menjadi hak dasar setiap warga negara, tetapi juga menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakannya secara merata dan berkualitas (Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2025). Pemerataan pendidikan menjadi prasyarat penting untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dalam pembangunan daerah. Pendidikan yang merata akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat (Sihombing & Kusuma, 2022). Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, termasuk di Kabupaten Bogor sebagai salah satu daerah dengan kompleksitas wilayah yang tinggi.

Kabupaten Bogor memiliki karakteristik geografis yang sangat beragam dengan 40 kecamatan yang tersebar di wilayah seluas 118,50 km² (Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2025). Keberagaman kondisi geografis ini menciptakan disparitas yang signifikan dalam akses dan kualitas pendidikan antarwilayah. Kecamatan-kecamatan yang berada di wilayah perkotaan atau dekat dengan pusat pertumbuhan ekonomi cenderung memiliki fasilitas pendidikan yang lebih lengkap dan berkualitas, sementara kecamatan-kecamatan di wilayah terpencil, pegunungan, atau perdesaan masih menghadapi keterbatasan serius dalam hal infrastruktur pendidikan, ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas, serta akses terhadap sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa kecamatan dengan kepadatan penduduk tinggi dan akses ke wilayah perkotaan biasanya memiliki capaian pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan kecamatan perdesaan atau daerah yang jauh dari pusat pelayanan (Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2025).

Permasalahan ketimpangan pendidikan di Kabupaten Bogor terlihat dari indikator-indikator pendidikan yang menunjukkan variasi capaian cukup besar antarwilayah. Berdasarkan data Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029, masih terdapat isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian serius, termasuk masalah anak tidak sekolah (ATS), peningkatan rata-rata lama sekolah (RLS), serta perluasan akses dan pemerataan pendidikan (Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2025). Selain itu, penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa jenjang pendidikan yang ditamatkan oleh mayoritas penduduk Kabupaten Bogor hingga tahun 2024 yaitu mayoritas >80% masih berada pada level Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) (Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2025).

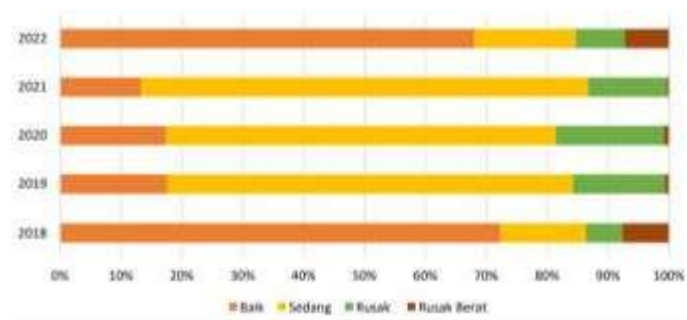


Sumber: Laporan Akhir IPM dan PDRB 40 Kecamatan Kabupaten Bogor, Bappedalitbang (2025)

Gambar 1. Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan Penduduk Kabupaten Bogor Tahun 2024

Gambar 1 menunjukkan bahwa distribusi tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan oleh penduduk Kabupaten Bogor hingga tahun 2024. Data visual ini memperlihatkan bahwa mayoritas penduduk masih menyelesaikan pendidikan pada jenjang dasar dan menengah, dengan persentase yang sangat kecil mencapai jenjang diploma dan sarjana (S1). Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat tantangan besar dalam meningkatkan partisipasi dan capaian pendidikan tinggi di Kabupaten Bogor. Rendahnya capaian pendidikan tinggi ini berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah, serta menunjukkan perlunya intervensi kebijakan yang lebih fokus untuk mendorong masyarakat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, terutama di kecamatan-kecamatan yang masih tertinggal.

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi ketimpangan pendidikan di Kabupaten Bogor adalah disparitas dalam ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendidikan, yang sangat dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur wilayah secara umum, terutama kondisi jalan sebagai akses utama menuju fasilitas pendidikan. Infrastruktur jalan yang baik memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial budaya kehidupan masyarakat, termasuk akses terhadap pendidikan (Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2025). Namun, kondisi jalan di Kabupaten Bogor selama periode 2018-2022 menunjukkan penurunan kualitas yang sangat signifikan.



Sumber: Laporan Akhir IPM dan PDRB 40 Kecamatan Kabupaten Bogor, Bappedalitbang (2025)

Gambar 2. Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Jalan Tahun 2018-2022

Gambar 2 menunjukkan bahwa terjadi penurunan drastis kualitas infrastruktur jalan di Kabupaten Bogor. Terlihat bahwa kualitas jalan dengan kondisi baik yang pada tahun 2018 sepanjang > 1200 km, kemudian pada tahun 2020 kualitas jalan dengan kondisi baik yaitu hanya sepanjang < 300 km, artinya terjadi penurunan kualitas jalan selama kurun waktu 2 tahun terakhir sebesar > 75% (Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2025). Kondisi infrastruktur jalan yang buruk ini berdampak langsung pada aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas pendidikan, terutama di kecamatan-kecamatan terpencil dan perdesaan. Anak-anak yang tinggal di wilayah dengan kondisi jalan rusak menghadapi hambatan serius untuk mencapai sekolah, yang pada gilirannya meningkatkan risiko putus sekolah dan menurunkan partisipasi pendidikan. Kondisi ini juga mempersulit distribusi guru, sarana pembelajaran, dan bantuan pendidikan ke wilayah-wilayah terpencil, sehingga semakin memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah. Penelitian di Kampung Manceri, Cigudeg, Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa faktor jarak antara rumah dan sekolah, ditambah dengan kondisi jalan yang tidak memadai, menjadi salah satu penyebab utama rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di daerah terpencil (Abduh et al., 2022). Selain itu, keterbatasan dana pendidikan dan distribusinya yang tidak merata juga menjadi hambatan serius. Penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan alokasi dana untuk pendidikan memberikan pengaruh positif terhadap kesenjangan pendidikan, dimana semakin besar kesenjangan dana yang disalurkan pada setiap daerah, maka semakin besar pula kesenjangan pendidikan yang terjadi (Sihombing & Kusuma, 2022).

Instrumen analisis yang tepat dan komprehensif diperlukan untuk memahami pola dan dinamika ketimpangan pembangunan pendidikan antarwilayah di Kabupaten Bogor. Tipologi Klassen merupakan salah satu metode analisis yang telah terbukti efektif untuk mengidentifikasi disparitas pembangunan antarwilayah dengan membagi wilayah ke dalam empat kuadran berdasarkan tingkat pencapaian indikator tertentu dan laju pertumbuhannya. Dalam konteks pendidikan, tipologi ini dapat digunakan untuk memetakan posisi setiap kecamatan berdasarkan capaian pendidikannya (seperti Indeks Pendidikan, Rata-rata Lama Sekolah, dan Harapan Lama Sekolah) serta indikator pendukung lainnya seperti ketersediaan fasilitas Pendidikan (Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2025). Melalui analisis tipologi Klassen, dapat diidentifikasi kecamatan-kecamatan yang termasuk kategori maju dan berkembang pesat (kuadran I), kecamatan berkembang dengan potensi tinggi (kuadran II), kecamatan tertinggal (kuadran III), serta kecamatan yang relatif maju namun dengan pertumbuhan lambat (kuadran IV). Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih holistik dan strategis dalam merumuskan kebijakan pembangunan pendidikan yang berbasis pada karakteristik dan kebutuhan spesifik masing-masing wilayah (Hendajany & Riza, 2023).

Penelitian mengenai ketimpangan pendidikan di Kabupaten Bogor menjadi semakin penting karena untuk mengendalikan dampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi daerah. Ketimpangan pendidikan tidak hanya menghambat mobilitas sosial masyarakat, tetapi juga berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi antarwilayah dan melanggengkan kemiskinan struktural (Pugu et al., 2025). Hal ini ditegaskan bahwa ketimpangan pendidikan di Indonesia masih menjadi isu krusial yang menghambat pemerataan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan nasional (Pugu et al., 2025). Dengan memahami pola ketimpangan pendidikan melalui analisis tipologi Klassen, pemerintah daerah dapat merancang intervensi kebijakan yang lebih tepat sasaran, baik dalam

bentuk alokasi anggaran, pembangunan infrastruktur pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, maupun program afirmatif untuk kecamatan-kecamatan yang tertinggal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif ketimpangan pembangunan pendidikan antarwilayah di Kabupaten Bogor menggunakan pendekatan tipologi Klassen, sehingga dapat memberikan rekomendasi strategis bagi perumusan kebijakan pendidikan yang lebih adil dan merata di masa mendatang.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan pendekatan analisis spasial untuk mengidentifikasi pola ketimpangan pembangunan pendidikan antar kecamatan di Kabupaten Bogor. Lokus penelitian mencakup seluruh 40 kecamatan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan periode waktu penelitian tahun 2020-2023. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari Laporan Akhir IPM dan PDRB 40 Kecamatan di Kabupaten Bogor yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor. Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan mengakses publikasi resmi BPS Kabupaten Bogor, baik dalam bentuk cetak maupun digital melalui portal resmi BPS. Indikator utama yang dikumpulkan meliputi Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk masing-masing kecamatan selama periode 2020- 2023. Data yang terkumpul kemudian diverifikasi dan ditabulasi dalam bentuk matriks data panel untuk memudahkan proses analisis lebih lanjut.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis Tipologi Klassen, yaitu metode klasifikasi wilayah berdasarkan dua dimensi: (1) tingkat pertumbuhan indikator pendidikan, dan (2) tingkat capaian indikator pendidikan relatif terhadap rata-rata kabupaten. Analisis dilakukan dengan menghitung rata-rata pertumbuhan HLS dan RLS serta rata-rata capaian kedua indikator tersebut dari seluruh kecamatan sebagai nilai pembanding. Berdasarkan hasil perhitungan, setiap kecamatan diklasifikasikan ke dalam empat kuadran: Kuadran I (Maju dan Tumbuh Cepat), Kuadran II (Maju Namun Tertekan), Kuadran III (Berkembang Cepat), dan Kuadran IV (Tertinggal). Hasil klasifikasi kemudian divisualisasikan dalam diagram kartesius dan peta tematik, serta dilengkapi dengan analisis deskriptif untuk memberikan interpretasi mendalam tentang karakteristik dan pola ketimpangan pembangunan pendidikan di masing-masing kuadran. Penggunaan metode Tipologi Klassen dipilih karena mampu memberikan gambaran komprehensif tentang posisi relatif setiap kecamatan sekaligus mengidentifikasi prioritas intervensi kebijakan berbasis karakteristik wilayah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Kondisi Pendidikan di Kabupaten Bogor

Kondisi pendidikan di Kabupaten Bogor selama periode 2020–2023 menunjukkan capaian yang beragam antarkecamatan, yang tercermin dari variasi pencapaian indikator pendidikan di setiap wilayah. Berdasarkan Laporan Akhir IPM dan PDRB 40 Kecamatan Kabupaten Bogor, variasi tersebut terlihat pada dua indikator utama pendidikan, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) yang menggambarkan peluang lama sekolah anak di masa mendatang, serta Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang menunjukkan rata-rata tahun pendidikan formal

penduduk berusia 25 tahun ke atas.



Sumber: Laporan Akhir IPM dan PDRB 40 Kecamatan Kabupaten Bogor, Bappedalitbang (2025)

Gambar 3. Grafik Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Bogor 2011-2024

Data menunjukkan bahwa rata-rata HLS Kabupaten Bogor pada tahun 2024 mencapai 12,75 tahun, yang berarti anak-anak di Kabupaten Bogor secara rata-rata memiliki peluang untuk menempuh pendidikan hingga hampir menyelesaikan jenjang SMA/SMK (Bappedalitbang, 2025). Capaian tersebut menunjukkan peningkatan yang konsisten dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2011 HLS Kabupaten Bogor masih tercatat sebesar 10,28 tahun, sehingga peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan akses pendidikan yang didukung oleh ketersediaan fasilitas sekolah, tenaga pendidik, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal (Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2025).



Sumber: Laporan Akhir IPM dan PDRB 40 Kecamatan Kabupaten Bogor, Bappedalitbang (2025)

Gambar 4. Grafik Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Bogor 2011-2024

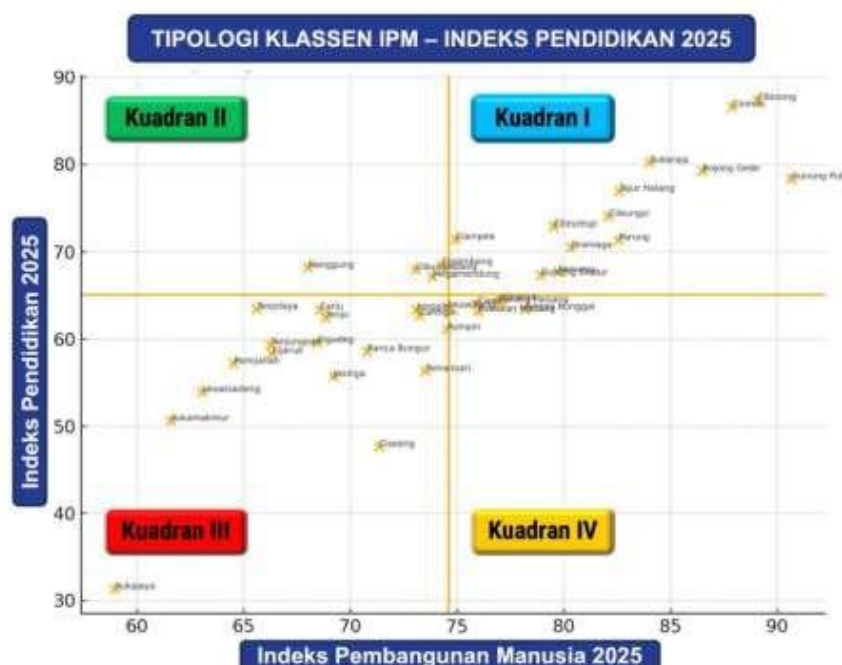
Gambar 4 menunjukkan bahwa Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Bogor pada tahun 2024 tercatat sebesar 8,39 tahun, yang menunjukkan bahwa penduduk secara rata-rata telah menempuh pendidikan setara dengan kelas dua Sekolah Menengah Pertama (SMP) (Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2025). Nilai ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011 yang masih berada pada angka 6,92 tahun, namun laju kenaikan yang relatif terbatas dalam lima tahun terakhir mengindikasikan masih adanya tantangan dalam memperluas partisipasi pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi.

Variasi capaian pendidikan yang cukup lebar antarkecamatan mengindikasikan adanya

ketimpangan pembangunan pendidikan yang signifikan di Kabupaten Bogor. Disparitas tersebut tercermin tidak hanya dari perbedaan nilai Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), tetapi juga dari perbedaan laju pertumbuhan kedua indikator tersebut di masing-masing kecamatan. Analisis data 40 kecamatan menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara kecamatan dengan capaian pendidikan tertinggi dan terendah, sehingga pemerataan kualitas pendidikan belum sepenuhnya tercapai. Kecamatan dengan kepadatan penduduk tinggi dan kedekatan terhadap wilayah perkotaan cenderung memiliki capaian pendidikan yang lebih baik dibandingkan kecamatan perdesaan atau wilayah yang jauh dari pusat pelayanan, yang memperlihatkan kuatnya pengaruh karakteristik wilayah terhadap capaian pembangunan pendidikan (Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2025).

Ketimpangan pembangunan pendidikan juga tercermin dari kondisi infrastruktur pendukung yang tidak merata antarwilayah, khususnya kualitas jalan dan aksesibilitas wilayah. Data menunjukkan bahwa selama periode 2018–2022 terjadi penurunan kualitas jalan di Kabupaten Bogor secara signifikan, yakni >75% yang berdampak langsung pada akses pendidikan di kecamatan-kecamatan terpencil (Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2025). Keterbatasan infrastruktur jalan tidak hanya menyulitkan mobilitas siswa menuju sekolah, tetapi juga menghambat distribusi tenaga pendidik, sarana pembelajaran, serta pelaksanaan program bantuan pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemajuan pembangunan pendidikan secara agregat belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan kualitas layanan pendidikan antarkecamatan, sehingga diperlukan kebijakan pendidikan yang lebih responsif terhadap hambatan geografis dan struktural wilayah.

3.2. *Klasifikasi Kecamatan berdasarkan Tipologi Klassen*



Sumber: Laporan Akhir IPM dan PDRB 40 Kecamatan Kabupaten Bogor, Bappedalitbang (2025)

Gambar 5. Diagram Tipologi Klassen IPM - Indeks Pendidikan 2025

Analisis Tipologi Klassen digunakan untuk mengelompokkan 40 kecamatan di Kabupaten Bogor ke dalam empat kuadran berdasarkan dua dimensi utama, yaitu Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pendidikan (IP). Berdasarkan data (Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2025), rata-rata IPM Kabupaten Bogor pada tahun 2025 tercatat sebesar 71,52, sedangkan rata-rata IP mencapai 65,23 yang selanjutnya digunakan sebagai garis pembatas pada sumbu horizontal dan vertikal dalam diagram kartesius. Setiap kecamatan kemudian diposisikan sesuai dengan nilai IPM dan IP yang dimilikinya untuk menunjukkan posisi relatif pembangunan pendidikan antarwilayah. Tipologi Klassen dipilih karena mampu memberikan gambaran yang jelas dan mudah dipahami mengenai tingkat kemajuan masing-masing kecamatan, sekaligus membantu mengidentifikasi wilayah yang memerlukan prioritas intervensi kebijakan berdasarkan karakteristik pembangunannya (Hendajany & Riza, 2023). Melalui klasifikasi ini, terlihat pemetaan kecamatan yang telah maju, sedang berkembang, serta masih tertinggal dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Bogor.

Diagram kartesius tersebut menggambarkan posisi 40 kecamatan di Kabupaten Bogor berdasarkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pendidikan. Garis horizontal merepresentasikan rata-rata IPM Kabupaten Bogor sebesar 71,52, sedangkan garis vertikal menunjukkan rata-rata Indeks Pendidikan sebesar 65,23. Letak setiap kecamatan dalam diagram ini mencerminkan kondisi pembangunan manusia secara umum sekaligus kualitas pembangunan pendidikan yang dicapai di masing-masing wilayah. Pola sebaran yang terbentuk menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup jelas, di mana sebagian kecamatan terkonsentrasi pada kuadran kanan atas yang menandakan capaian IPM dan Indeks Pendidikan yang tinggi, sementara kecamatan lainnya terkumpul pada kuadran kiri bawah yang menunjukkan capaian rendah pada kedua indikator tersebut. Pola konsentrasi ini memperkuat temuan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa disparitas pembangunan pendidikan sangat dipengaruhi oleh faktor geografis, kondisi ekonomi, dan tingkat aksesibilitas wilayah (Sihombing & Kusuma, 2022).

Hasil klasifikasi Tipologi Klassen juga menunjukkan distribusi kecamatan yang tidak merata antar kuadran. Mayoritas kecamatan berada pada Kuadran I dan Kuadran IV, sementara Kuadran II dan Kuadran III hanya dihuni oleh relatif sedikit kecamatan. Kondisi ini mengindikasikan adanya polarisasi pembangunan pendidikan di Kabupaten Bogor, di mana kesenjangan antara kecamatan yang sudah maju dan kecamatan yang tertinggal terlihat cukup lebar, sementara kelompok kecamatan dengan karakteristik transisi relatif terbatas. Pola ini sejalan dengan fenomena ketimpangan pembangunan pendidikan di berbagai wilayah Indonesia, di mana daerah dengan aksesibilitas tinggi dan basis ekonomi yang kuat cenderung memiliki capaian pendidikan yang lebih baik, sedangkan wilayah terpencil dan ekonomi lemah tertinggal secara signifikan (Pugu et al., 2025). Polarisasi tersebut menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah karena upaya pemerataan kualitas pendidikan memerlukan strategi dan intervensi kebijakan yang berbeda sesuai dengan karakteristik masing-masing kuadran.

3.2.1. Karakteristik Kecamatan di Kuadran I (Maju dan Tumbuh Cepat)

Kuadran I merepresentasikan kecamatan yang tergolong maju dan tumbuh cepat, yaitu wilayah dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di atas rata-rata Kabupaten Bogor (71,52) dan Indeks Pendidikan yang juga berada di atas rata-rata kabupaten (65,23). Berdasarkan hasil Tipologi Klassen, terdapat sembilan kecamatan yang termasuk dalam kategori ini, yaitu Cibinong, Bojong Gede, Gunung Putri, Cileungsi, Sukaraja, Ciomas,

Tajurhalang, Citeureup, dan Parung (Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2025). Kecamatan-kecamatan tersebut umumnya berada di sekitar kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi, memiliki aksesibilitas yang tinggi, serta didukung oleh tingkat PDRB yang relatif besar. Posisi ini menunjukkan bahwa wilayah Kuadran I tidak hanya unggul dalam pembangunan pendidikan, tetapi juga memiliki fondasi pembangunan manusia yang kuat secara keseluruhan.

Keunggulan kecamatan-kecamatan di Kuadran I didukung oleh ketersediaan infrastruktur pendidikan yang relatif lengkap dan berkualitas. Laporan menunjukkan bahwa wilayah-wilayah ini memiliki fasilitas pendidikan yang memadai dari jenjang dasar hingga menengah atas, didukung oleh tenaga pendidik yang berkualifikasi serta sarana pembelajaran seperti perpustakaan, laboratorium, dan akses teknologi informasi yang lebih baik dibandingkan kecamatan lain (Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2025). Kedekatan geografis dengan pusat-pusat ekonomi seperti Jakarta, Depok, dan Kota Bogor juga memberikan keuntungan tambahan, terutama dalam hal mobilitas tenaga pendidik, akses informasi, serta adopsi inovasi pendidikan yang lebih cepat. Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian yang menyatakan bahwa wilayah dengan infrastruktur pendidikan yang baik cenderung memiliki tingkat partisipasi dan capaian pendidikan yang lebih tinggi (Abduh et al., 2022).

Aspek ekonomi turut berperan penting dalam mendorong capaian pendidikan di Kuadran I. Kecamatan-kecamatan dalam kategori ini umumnya memiliki PDRB per kapita yang lebih tinggi, yang ditopang oleh aktivitas ekonomi di sektor industri, perdagangan, dan jasa. Kondisi ekonomi yang lebih baik meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membiayai pendidikan anak, termasuk kebutuhan transportasi dan sarana belajar. Penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara tingkat pendapatan keluarga dan partisipasi pendidikan, di mana kondisi ekonomi yang lebih kuat memungkinkan anak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (Sihombing & Kusuma, 2022). Meskipun demikian, kecamatan-kecamatan di Kuadran I tetap menghadapi tantangan, terutama akibat tekanan demografis dari urbanisasi yang meningkatkan jumlah penduduk dan kebutuhan layanan pendidikan. (Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2025) menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi berpotensi menekan kapasitas sekolah dan kualitas layanan jika tidak diimbangi dengan penambahan infrastruktur dan tenaga pendidik yang memadai sehingga keberlanjutan kualitas pendidikan tetap memerlukan perhatian kebijakan yang konsisten.

3.2.2. Karakteristik Kecamatan di Kuadran II (Maju Namun Tertekan)

Kuadran II mencakup kecamatan dengan capaian Indeks Pendidikan di atas rata-rata Kabupaten Bogor (65,23), tetapi memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih berada di bawah rata-rata kabupaten (71,52). Beberapa kecamatan yang termasuk dalam kategori ini antara lain Tenjo, Ciseeng, dan Jasinga (Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pendidikan di wilayah-wilayah tersebut telah berkembang relatif baik, namun pencapaian tersebut belum diikuti oleh peningkatan pada dimensi pembangunan manusia lainnya, terutama kesehatan dan daya beli. Situasi ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan pembangunan antar sektor, di mana kemajuan pendidikan belum sepenuhnya terkonversi menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Karakteristik kecamatan di Kuadran II memperlihatkan bahwa capaian pendidikan yang

tinggi tidak selalu sejalan dengan kondisi ekonomi yang kuat. Meskipun fasilitas pendidikan tersedia dan tingkat partisipasi sekolah relatif baik, masyarakat di wilayah ini masih menghadapi keterbatasan akses terhadap peluang ekonomi yang layak (Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2025). Keterbatasan lapangan kerja formal, tingkat upah yang relatif rendah, serta jarak yang cukup jauh dari pusat-pusat ekonomi mendorong sebagian lulusan pendidikan untuk bermigrasi ke wilayah lain. Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian yang menyatakan bahwa ketimpangan ekonomi dapat menghambat kemampuan pendidikan dalam meningkatkan kesejahteraan secara nyata (Hendajany & Riza, 2023).

Rendahnya IPM di Kuadran II juga berkaitan dengan dimensi kesehatan dan daya beli masyarakat. Laporan menunjukkan bahwa beberapa kecamatan dalam kuadran ini masih memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan, baik dari sisi jarak maupun kualitas layanan, yang berdampak pada rendahnya Indeks Kesehatan (Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2025). Daya beli masyarakat yang relatif rendah, terutama di wilayah yang masih didominasi sektor pertanian dengan produktivitas rendah, turut menekan capaian IPM. Penelitian menegaskan bahwa peningkatan IPM membutuhkan pendekatan pembangunan yang terintegrasi, tidak hanya berfokus pada pendidikan, tetapi juga pada perbaikan layanan kesehatan dan penguatan ekonomi lokal (Pugu et al., 2025).

Kecamatan-kecamatan di Kuadran II memiliki peluang besar untuk bergerak menuju Kuadran I apabila didukung oleh kebijakan yang tepat sasaran. Peningkatan konektivitas wilayah menuju pusat ekonomi, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta perbaikan akses dan kualitas layanan kesehatan menjadi faktor kunci dalam mendorong kenaikan IPM. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, dukungan permodalan, dan pengembangan UMKM, juga diperlukan agar modal pendidikan yang sudah baik dapat diubah menjadi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (Sihombing & Kusuma, 2022). Pendekatan pembangunan yang holistik dan multisektoral menjadi strategi penting untuk memaksimalkan potensi sumber daya manusia di kecamatan-kecamatan Kuadran II.

3.2.3. Karakteristik Kecamatan di Kuadran III (Berkembang Cepat)

Kuadran III merepresentasikan kecamatan-kecamatan yang memiliki capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pendidikan yang masih berada di bawah rata-rata Kabupaten Bogor, namun menunjukkan adanya potensi dan momentum pembangunan yang positif. Beberapa kecamatan yang termasuk dalam kategori ini antara lain Tenjolaya, Cariu, dan Nanggung (Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2025). Posisi di Kuadran III menunjukkan bahwa wilayah-wilayah tersebut sedang berada dalam fase transisi, di mana upaya pembangunan yang dilakukan mulai memberikan hasil, meskipun capaian akhirnya belum optimal.

Kondisi infrastruktur pendidikan di kecamatan-kecamatan Kuadran III umumnya masih terbatas, namun mengalami perbaikan secara bertahap. Laporan menunjukkan adanya intervensi pemerintah daerah berupa rehabilitasi sekolah, penambahan ruang kelas, serta peningkatan jumlah tenaga pendidik di beberapa wilayah (Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2025). Meskipun kualitas dan kelengkapan fasilitas pendidikan belum sebanding dengan kecamatan-kecamatan maju, komitmen pembangunan yang berkelanjutan memberikan peluang bagi peningkatan partisipasi dan kualitas pendidikan. Penelitian menegaskan bahwa

pembangunan infrastruktur pendidikan yang konsisten merupakan faktor kunci dalam mendorong kemajuan pendidikan di wilayah tertinggal (Abduh et al., 2022).

Momentum positif di Kuadran III juga didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Data menunjukkan adanya tren peningkatan partisipasi sekolah yang dipengaruhi oleh program pemerintah seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta kampanye wajib belajar (Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2025). Akses informasi yang semakin luas melalui media dan internet turut berperan dalam mengubah pola pikir masyarakat mengenai nilai pendidikan. Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian yang menyatakan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat dapat mendorong partisipasi pendidikan secara signifikan, meskipun berada dalam keterbatasan ekonomi (Pugu et al., 2025).

Kecamatan-kecamatan di Kuadran III masih menghadapi tantangan struktural yang cukup serius, terutama terkait aksesibilitas dan kondisi ekonomi masyarakat. Infrastruktur jalan yang rusak dan topografi wilayah yang sulit menyebabkan akses menuju sekolah menjadi terbatas, sehingga menghambat mobilitas siswa dan guru (Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2025). Penelitian di wilayah terpencil seperti Kampung Manceri, Cigudeg menunjukkan bahwa jarak dan kondisi jalan menjadi faktor utama rendahnya capaian pendidikan (Abduh et al., 2022). Selain itu, keterbatasan ekonomi keluarga membuat sebagian anak terpaksa membantu orang tua bekerja, sehingga berisiko putus sekolah, terutama di sektor pertanian dan informal (Sihombing & Kusuma, 2022).

Peningkatan posisi kecamatan-kecamatan Kuadran III menuju Kuadran I memerlukan strategi pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Prioritas kebijakan perlu diarahkan pada perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan dan pemerataan fasilitas pendidikan, pemberian insentif dan pelatihan bagi guru di daerah terpencil, serta perluasan program bantuan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat agar lebih tepat sasaran (Hendajany & Riza, 2023). Dengan pendekatan yang konsisten dan berbasis karakteristik wilayah, kecamatan-kecamatan di Kuadran III memiliki potensi besar untuk meningkatkan capaian pendidikan dan pembangunan manusia secara menyeluruh.

3.2.4. Karakteristik Kecamatan di Kuadran IV (Tertinggal)

Kuadran IV merupakan kelompok kecamatan yang paling tertinggal karena memiliki capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pendidikan yang sama-sama berada di bawah rata-rata Kabupaten Bogor. Beberapa kecamatan yang termasuk dalam kategori ini antara lain Sukajaya, Leuwisadeng, Pamijahan, Cigudeg, Cijeruk, dan Tanjungsari (Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2025). Kecamatan-kecamatan tersebut mengalami ketertinggalan ganda, di mana rendahnya capaian pendidikan berjalan beriringan dengan rendahnya kualitas pembangunan manusia secara keseluruhan. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan pendidikan tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, dan rendahnya akses terhadap layanan dasar.

Faktor geografis menjadi penyebab utama ketertinggalan kecamatan-kecamatan di Kuadran IV. Wilayah-wilayah ini umumnya berada di bagian selatan dan barat Kabupaten Bogor dengan topografi berbukit dan relatif terpencil dari pusat pertumbuhan ekonomi (Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2025). Kondisi tersebut diperparah oleh kualitas

infrastruktur jalan yang buruk, di mana banyak akses jalan rusak atau sulit dilalui, terutama saat musim hujan. Penurunan kualitas jalan Kabupaten Bogor selama periode 2018-2022 yang mencapai lebih dari 75% berdampak paling besar pada kecamatan-kecamatan terpencil ini (Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2025). Infrastruktur yang tidak memadai menghambat akses siswa ke sekolah, mobilitas guru, serta penyaluran program bantuan pendidikan. Penelitian menunjukkan bahwa faktor geografis dan kondisi infrastruktur merupakan penentu utama kesenjangan pendidikan di wilayah terpencil (Abduh et al., 2022).

Keterbatasan fasilitas dan tenaga pendidik juga menjadi masalah serius di Kuadran IV. Banyak sekolah di wilayah ini memiliki kondisi bangunan yang tidak layak, kekurangan ruang kelas, serta minim sarana pembelajaran seperti perpustakaan, laboratorium, dan akses internet (Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2025). Selain itu, distribusi guru masih sangat tidak merata, baik dari sisi jumlah maupun kualifikasi. Kondisi geografis yang sulit dan kesejahteraan yang rendah membuat wilayah ini kurang diminati oleh tenaga pendidik, sehingga rasio guru-murid sering kali tidak ideal dan kualitas pembelajaran menjadi kurang optimal. Penelitian menegaskan bahwa ketimpangan distribusi dan kualitas guru merupakan salah satu faktor utama ketimpangan pendidikan antarwilayah (Hendajany & Riza, 2023).

Kondisi ekonomi masyarakat yang rendah semakin memperparah permasalahan pendidikan di Kuadran IV. Mayoritas penduduk bergantung pada sektor pertanian tradisional dengan produktivitas rendah, sehingga pendapatan keluarga terbatas. Meskipun terdapat program bantuan pendidikan, biaya tidak langsung seperti transportasi dan perlengkapan sekolah tetap menjadi beban berat bagi keluarga (Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2025). Kondisi ini sering memaksa anak-anak untuk membantu orang tua bekerja, yang berdampak pada rendahnya partisipasi sekolah dan tingginya risiko putus sekolah. Penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan ekonomi memiliki pengaruh langsung terhadap kesenjangan pendidikan, terutama dalam keberlanjutan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (Sihombing & Kusuma, 2022).

Urgensi intervensi kebijakan di Kuadran IV sangat tinggi karena ketertinggalan wilayah ini berpotensi memperlebar kesenjangan pembangunan Kabupaten Bogor secara keseluruhan. Ketimpangan pendidikan yang dibiarkan berlarut-larut dapat menghambat mobilitas sosial dan melanggengkan kemiskinan struktural (Pugu et al., 2025). Oleh karena itu, diperlukan kebijakan afirmatif dan prioritas yang mencakup pembangunan infrastruktur jalan untuk membuka keterisolasian wilayah, rehabilitasi dan pembangunan fasilitas pendidikan, pemberian insentif khusus bagi guru di daerah terpencil, perluasan bantuan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan menjadi kunci agar kecamatan-kecamatan Kuadran IV dapat keluar dari lingkaran ketertinggalan pendidikan.

3.3. Pola Spasial Ketimpangan Pembangunan Pendidikan

Analisis pola spasial ketimpangan pembangunan pendidikan di Kabupaten Bogor menunjukkan adanya konsentrasi geografis yang jelas berdasarkan hasil klasifikasi Tipologi Klassen. Kecamatan-kecamatan yang berada di Kuadran I dan II (maju) cenderung terkonsentrasi di wilayah utara dan timur Kabupaten Bogor yang berdekatan dengan Kota Bogor, Kota Depok, dan kawasan metropolitan Jakarta. Kecamatan seperti Cibinong, Bojong

Gede, Gunung Putri, Cileungsi, dan Sukaraja memiliki lokasi strategis dengan aksesibilitas tinggi ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Kedekatan geografis ini memberikan keuntungan komparatif berupa akses terhadap fasilitas pendidikan yang lebih berkualitas, ketersediaan tenaga pendidik yang lebih baik, serta dukungan infrastruktur yang memadai (Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2025). Pola ini sejalan dengan temuan bahwa wilayah tengah dan utara Kabupaten Bogor yang berada dekat koridor Jabodetabek berkembang lebih cepat dibandingkan wilayah barat dan selatan yang bersifat lebih rural dan terisolasi (Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2025).

Kecamatan-kecamatan yang tergolong Kuadran IV (tertinggal) sebagian besar berada di wilayah selatan dan barat Kabupaten Bogor dengan karakteristik topografi berbukit, jarak yang relatif jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi, serta infrastruktur jalan yang kurang memadai. Kecamatan seperti Sukajaya, Nanggung, Jasinga, Cigudeg, dan Tanjungsari umumnya terletak di kawasan pegunungan dengan kondisi geografis yang kompleks. Kondisi tersebut memperburuk aksesibilitas pendidikan, di mana banyak sekolah di daerah terpencil mengalami keterbatasan infrastruktur, kekurangan tenaga pendidik, dan minim sarana pembelajaran akibat rendahnya perhatian pembangunan (Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2025). Penelitian di Kampung Manceri, Cigudeg menunjukkan bahwa faktor jarak dan kondisi geografis menjadi penyebab utama rendahnya tingkat pendidikan, diperparah oleh kondisi jalan yang berkelok dan sulit dilalui (Abduh et al., 2022). Temuan ini juga didukung dengan studi historis yang menunjukkan bahwa sekolah di daerah terpencil cenderung tertinggal dibandingkan wilayah perkotaan akibat keterbatasan fasilitas dan tenaga pengajar berkualitas (Adriawan & Prayogi, 2023).



Sumber: Laporan Akhir IPM dan PDRB 40 Kecamatan Kabupaten Bogor, Bappedalitbang (2025)

Gambar 6. Peta Indeks Perkembangan Kecamatan (IPK) Kabupaten Bogor 2025

Ketimpangan spasial pembangunan pendidikan tersebut semakin diperkuat oleh kondisi infrastruktur jalan yang tidak merata antarwilayah. Penurunan kualitas jalan di Kabupaten Bogor selama periode 2018-2022 yang mencapai lebih dari 75% berdampak lebih berat pada

kecamatan-kecamatan di wilayah selatan dan barat (Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2025). Kondisi jalan rusak secara langsung menghambat akses siswa ke sekolah serta distribusi guru dan sarana pendidikan. Laporan menegaskan bahwa kualitas infrastruktur jalan memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk dalam akses terhadap pendidikan (Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2025). (Sihombing & Kusuma, 2022) juga menemukan bahwa ketersediaan infrastruktur pendidikan yang memadai berperan penting dalam meningkatkan partisipasi dan pemerataan pendidikan.

Pola ketimpangan ini divisualisasikan secara jelas melalui Peta Indeks Perkembangan Kecamatan (IPK) Kabupaten Bogor. Kecamatan dengan IPK tinggi yang ditandai warna hijau terkonsentrasi di wilayah tengah, timur, dan utara, seperti Cibinong, Gunung Putri, Cileungsi, Bojong Gede, Citeureup, Gunung Sindur, Babakan Madang, Kemang, dan Parung. Kecamatan dengan IPK rendah yang ditandai warna merah tersebar di wilayah barat dan selatan, seperti Sukajaya, Nanggung, Rumpin, Cigudeg, Sukamakmur, Tenjo, dan Tanjungsari (Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2025). Visualisasi ini menunjukkan bahwa pembangunan wilayah di Kabupaten Bogor bersifat sangat spasial dan dipengaruhi oleh aksesibilitas, kedekatan dengan jaringan kegiatan metropolitan, serta ketersediaan layanan dasar (Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2025).

Kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih tergolong tinggi, terutama dalam aspek ketersediaan guru berkualitas dan sarana pembelajaran. Wilayah perkotaan cenderung memiliki tenaga pendidik dengan kualifikasi lebih baik, sementara wilayah terpencil menghadapi kekurangan guru dan keterbatasan fasilitas pendidikan (Hendajany & Riza, 2023). Penelitian lain menunjukkan bahwa minimnya sarana prasarana, rendahnya insentif guru, serta distribusi dana pendidikan yang tidak merata turut memperlebar kesenjangan pendidikan antarwilayah (Sihombing & Kusuma, 2022; Wahyudi et al., 2022). Kondisi ini menegaskan bahwa strategi pembangunan pendidikan di Kabupaten Bogor perlu mempertimbangkan karakteristik spasial wilayah melalui pendekatan kebijakan yang berbeda, khususnya melalui penguatan konektivitas, pembangunan fasilitas pendidikan di daerah terpencil, dan penerapan kebijakan afirmatif berbasis kebutuhan wilayah.

3.4. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pembangunan Pendidikan*

Ketimpangan pembangunan pendidikan antarkecamatan di Kabupaten Bogor dipengaruhi kuat oleh kondisi ekonomi wilayah yang tercermin dalam PDRB per kecamatan. Kecamatan dengan PDRB tinggi seperti Gunung Putri dan Cileungsi menunjukkan capaian HLS dan RLS yang jauh lebih baik dibandingkan kecamatan dengan PDRB rendah seperti Tanjungsari dan Jasinga. Tipologi Klassen IPM–PDRB menunjukkan bahwa kecamatan di Kuadran I (IPM tinggi–PDRB tinggi) seperti Gunung Putri, Cileungsi, Citeureup, dan Cibinong berperan sebagai pusat pertumbuhan dengan struktur ekonomi kuat dan kualitas hidup yang lebih baik (Bappedalitbang, 2025). Sementara itu, kecamatan di Kuadran III (IPM rendah–PDRB rendah) seperti Sukajaya, Sukamakmur, Pamijahan, dan Cigudeg mengalami ketertinggalan ganda yang menunjukkan keterkaitan antara rendahnya kualitas SDM dan lemahnya basis ekonomi, sehingga membutuhkan intervensi pembangunan yang komprehensif (Bappedalitbang, 2025). Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan adanya perbedaan kualitas dan return to education antarwilayah akibat ketimpangan infrastruktur

pendidikan (Hendajany & Riza, 2023).

Kondisi infrastruktur jalan menjadi faktor penghambat utama akses pendidikan, khususnya di kecamatan-kecamatan terpencil. Penurunan kualitas jalan di Kabupaten Bogor sebesar lebih dari 75% pada periode 2018-2022 berdampak langsung terhadap kemampuan masyarakat mengakses fasilitas pendidikan (Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2025). Anak-anak di wilayah dengan jalan rusak menghadapi hambatan menuju sekolah, yang meningkatkan risiko putus sekolah dan menurunkan partisipasi pendidikan. Studi di Kampung Manceri, Cigudeg menunjukkan bahwa jarak sekolah yang jauh dan kondisi jalan yang sempit, terjal, serta berisiko menjadi penyebab utama rendahnya tingkat pendidikan masyarakat (Abduh et al., 2022). Hambatan infrastruktur ini juga mengganggu distribusi guru, sarana pembelajaran, dan bantuan pendidikan ke wilayah yang paling membutuhkan.

Faktor geografis dan aksesibilitas wilayah turut memperkuat ketimpangan pendidikan antarkecamatan. Wilayah perdesaan, pegunungan, dan terpencil masih menghadapi keterbatasan infrastruktur pendidikan, kekurangan tenaga pendidik berkualitas, serta minimnya sarana pembelajaran (Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2025). Studi menunjukkan bahwa di beberapa wilayah hanya tersedia satu SD atau SLTP, sementara SLTA berada jauh di ibu kota kecamatan sehingga sulit dijangkau masyarakat (Adriawan & Prayogi, 2023). Ketimpangan ini diperparah oleh distribusi dana pendidikan yang tidak merata, dimana kesenjangan alokasi anggaran berkontribusi langsung terhadap kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah (Sihombing & Kusuma, 2022). Keterbatasan fasilitas seperti perpustakaan, laboratorium, ruang kelas layak, dan akses teknologi semakin memperlebar jurang kualitas pembelajaran antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Faktor sosial budaya dan kondisi keluarga juga berperan signifikan dalam menciptakan ketimpangan pendidikan. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan di beberapa wilayah masih rendah, sehingga anak-anak lebih didorong untuk bekerja membantu keluarga dibandingkan melanjutkan sekolah (Pugu et al., 2025). Penelitian di daerah terpencil Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa faktor ekonomi keluarga menjadi penyebab utama anak putus sekolah, karena keterbatasan biaya pendidikan, perlengkapan sekolah, dan transportasi (Abduh et al., 2022). Kualitas tenaga pendidik di daerah terpencil juga menjadi persoalan, dimana keterbatasan kompetensi, minimnya pelatihan, serta rendahnya insentif dan kesejahteraan guru berdampak pada rendahnya kualitas pembelajaran (Pugu et al., 2025). Kombinasi faktor ekonomi, infrastruktur, geografis, dan sosial budaya ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan di Kabupaten Bogor bersifat multidimensi dan memerlukan pendekatan kebijakan yang holistik serta terintegrasi.

4. PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan pendidikan antarkecamatan di Kabupaten Bogor masih sangat signifikan, sebagaimana terlihat dari hasil analisis Tipologi Klassen yang membagi 40 kecamatan ke dalam empat kuadran berbeda. Kecamatan-kecamatan yang terkonsentrasi di wilayah utara dan timur seperti Cibinong, Bojong Gede, dan Gunung Putri menempati posisi maju dengan capaian IPM dan Indeks Pendidikan di atas rata-rata kabupaten, sementara kecamatan-kecamatan di wilayah selatan dan barat seperti Sukajaya, Nanggung, dan Cigudeg masih tertinggal pada kedua indikator tersebut.

Pola ketimpangan ini sangat dipengaruhi oleh faktor geografis, kondisi infrastruktur jalan, disparitas ekonomi wilayah, serta keterbatasan akses terhadap fasilitas dan tenaga pendidik berkualitas.

Temuan penelitian menggarisbawahi urgensi kebijakan pembangunan pendidikan yang berbasis karakteristik dan kebutuhan spesifik wilayah. Kecamatan-kecamatan di Kuadran I memerlukan upaya pemeliharaan kualitas dan pengelolaan tekanan demografis akibat urbanisasi, sedangkan kecamatan-kecamatan di Kuadran IV membutuhkan intervensi afirmatif yang komprehensif mencakup perbaikan infrastruktur jalan, penambahan dan rehabilitasi fasilitas pendidikan, pemberian insentif khusus bagi guru di daerah terpencil, serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kecamatan-kecamatan di Kuadran II dan III memerlukan pendekatan transisi yang mendorong konversi capaian pendidikan menjadi peningkatan kesejahteraan melalui penguatan ekonomi lokal dan perbaikan layanan kesehatan.

Untuk mencapai pemerataan pendidikan yang berkelanjutan, pemerintah daerah perlu mengintegrasikan pembangunan pendidikan dengan pembangunan infrastruktur dan ekonomi wilayah secara holistik. Rekomendasi strategis meliputi alokasi anggaran pendidikan yang lebih proporsional berbasis kebutuhan wilayah, percepatan perbaikan infrastruktur jalan untuk membuka keterisolasian kecamatan terpencil, penerapan sistem insentif dan jaminan kesejahteraan guru di daerah tertinggal, pengembangan model sekolah berasrama atau transportasi sekolah untuk wilayah dengan jarak tempuh jauh, serta penguatan sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Pendekatan berbasis bukti melalui monitoring dan evaluasi berkala terhadap disparitas pendidikan antarwilayah juga menjadi kunci untuk memastikan efektivitas kebijakan dan ketepatan sasaran program pembangunan pendidikan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M., Basiru, A. A., Narayana, M. W., Safitri, N., & Fauzi, R. (2022). Potret pendidikan di daerah terpencil Kampung Manceri Cigudeg Kabupaten Bogor. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(1), 291–300. <https://www.jurnal.stkipkusumanegara.ac.id/index.php/citizenshipvirtues/article/view/1364>
- Adriawan, B., & Prayogi, A. (2023). Dinamika pembangunan pendidikan di Kota Bogor pada era Orde Baru. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Humaniora*, 9(2), 17–39. <https://josths.id/ojs3/index.php/paradigma/article/download/345/207>
- Bappedalitbang Kabupaten Bogor. (2025). *Laporan akhir analisis indeks pembangunan manusia (IPM) dan produk domestik regional bruto (PDRB) 40 kecamatan di Kabupaten Bogor tahun 2025*.
- Hendajany, N., & Riza, D. (2023). Analisis ketimpangan pendidikan di Jawa Barat dengan model imbal jasa pendidikan. *Jurnal Ekono Insentif*, 17(2), 123–134. <https://doi.org/10.36787/jei.v17i2.1183>
- Pugu, M. R., Elmiwati, & Rukimin. (2025). Ketimpangan pendidikan di Indonesia: Studi kebijakan dan evaluasi inovasi untuk menjembatani perbedaan kelas sosial. *Jurnal Pembelajaran Dan Pengembangan Diri*, 5(3), 295–304. <https://ojs.berajah.com/index.php/go/article/view/610>

- Sihombing, R. S. T., & Kusuma, N. P. (2022). Pemerataan pendidikan: Studi kasus 34 provinsi di Indonesia. *Parahyangan Economic Development Review*, 1(2), 143–151. <https://doi.org/10.26593/pedr.v1i2.6670>
- Wahyudi, L. E., Mulyana, A., Dhiaz, A., Ghandari, D., Putra Dinata, Z., Fitoriq, M., & Hasyim, M. N. (2022). Mengukur kualitas pendidikan di Indonesia. *Ma'arif Journal of Education, Madrasah Innovation and Aswaja Studies*, 1(1), 18–22. <https://jurnal.maarifnumalang.id/index.php/mjemias/article/view/3>